

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya mengenai sistem akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aktiva tetap yang dimiliki Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT terdiri dari : Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.
2. Metode beban penyusutan aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011) karena metode garis lurus yang digunakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aktiva jika nilai residunya tidak berubah.
3. Dokumen akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006, hal ini dibuktikan dengan belum dibuatnya berita acara kemajuan pemeriksaan.
4. Catatan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sudah sesuai dengan Permendagri 13

tahun 2006, yang meliputi buku jurnal umum, register bukti kas keluar, dan buku pembantu aktiva tetap,

5. Pihak yang terkait dalam akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan Permendagri 13 tahun 2006

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis menyarankan :

1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT diharapkan lebih transparan dan mengelola dan menerapkan sistem akuntansi aktiva tetap sebagai pendukung dan pelancar kegiatan.
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT diharapkan menambah dokumen berita acara kemajuan pemeriksaan sesuai dengan permendagri 13 tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
-, 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah*. Jakarta.
- , 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Anonim. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Andayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Bayumedia Publishing. Jawa Timur.
- Andi. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta : Andi OFFSET
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. : Yogyakarta Penerbit BPFE. Jogjakarta
- Baridwan Zaki. 2000. *Sistem Akuntansi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1996. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- H. Bordnar, George dan S. Hopwood. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Jusuf, Al, Haryono. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Kusnadi. 2002. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Penerbit Taroda. Malang
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta; STIE YKPN
- Soemarso. 1999. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta